



**RENCANA AKSI
KEUANGAN
BERKELANJUTAN (RAKB)
TAHUN 2026**



**BANK
SHINTA PUTRA**
PT. Bank Perekonomian Rakyat

PT. BPR BANK SHINTA PUTRA

KATA PENGANTAR

Mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, PT. BPR BANK SHINTA PUTRA menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026 untuk menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam aset perbankan. Upaya ini merupakan wujud dukungan terhadap inisiatif Green Banking.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan menjadi kewajiban bersama di sektor jasa keuangan demi tercapainya pembangunan berkelanjutan. Bagi PT. BPR BANK SHINTA PUTRA, mengabaikan isu lingkungan dan sosial dapat menimbulkan risiko, khususnya risiko kredit akibat meningkatnya tingkat gagal bayar. Dengan demikian, pembiayaan berkelanjutan berperan langsung dalam menjaga stabilitas keuangan bank dalam jangka panjang.

Sebagai Lembaga Jasa Keuangan, PT. BPR BANK SHINTA PUTRA memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Karena berperan sebagai perantara yang menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, bank dituntut selektif dalam menyalurkan pembiayaan, menghindari kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan. Dalam konteks ini, PT. BPR BANK SHINTA PUTRA menekankan pentingnya pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip triple bottom line –People, Planet, dan Profit–serta menelaraskan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam seluruh kegiatan usahanya.

PT. BPR BANK SHINTA PUTRA merencanakan program prioritas serta uraian RKAB Tahun 2026 yang akan dijalankan selama periode 1-5 tahun ke depan (2026-2030) dan diimplementasikan mulai tahun 2026. Fokus utama adalah pertumbuhan berkelanjutan melalui bisnis yang kuat dan sehat, khususnya dengan menitikberatkan pada sektor UMKM yang sejalan dengan visi dan misi bank, sambil tetap memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) pada seluruh operasi bisnis demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

SAMPUL LAPORAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF	4
1.1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	4
1.2. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan	4
1.3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	5
1.4. Program yang Akan Dilaksanakan Dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	5
1.5. Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan	7
1.6. Seluruh Pihak Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan	8
BAB II PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	9
2.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan	9
2.2. Keterlibatan Pihak Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	9
BAB III FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	10
3.1. Rencana Strategis Bank	10
3.2. Kapasitas Organisasi	10
3.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis	11
3.4. Strategi Komunikasi	12
3.5. Sistem Monitoring	13
3.6. Kebijakan Pemerintah	13
BAB IV PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	14
4.1. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan/atau Standar Prosedur Operasional yang mendukung Keuangan Berkelanjutan.	14
BAB V TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	16
5.1. Pegawai, Pejabat, Unit Kerja yang Bertanggung Jawab Terhadap Monitoring dan Evaluasi	16
5.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	16
5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	17
5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Tercapai Tujuan yang Diinginkan	17
5.5. Penutup	19

BAB I
RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Tahun 2025 merupakan tahap kedua implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Dengan demikian disampaikan Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha Berkelanjutan sesuai pada tabel di bawah ini

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Uraian	Tahun 2025 (Nominal Dalam Jutaan Rupiah)	
Produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha Berkelanjutan		
a. Penghimpunan Dana	Nihil	Nihil
b. Penyaluran Dana	31 Rekening	Rp5.827.771.600
Total Aset Produktif Pada Kegiatan Usaha Berkelanjutan		
a. Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Rp5.827.771.600	
b. Total Seluruh Kredit/Pembiayaan	Rp60.724.236.337	
Persentase total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan bank	9,60%	
Jumlah dan kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan	Rp5.827.771.620	NPL 0,00%
a. Energi terbarukan	Nihil	NPL Nihil
b. Efisiensi energi	Nihil	NPL Nihil
c. Pencegahan dan pengendalian polusi	Nihil	NPL Nihil
d. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	Nihil	NPL Nihil
e. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air	Nihil	NPL Nihil
f. Transportasi ramah lingkungan	Nihil	NPL Nihil
g. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan	Nihil	NPL Nihil
h. Adaptasi perubahan iklim	Nihil	NPL Nihil
i. Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (Eco Efficient)	Nihil	NPL Nihil
j. Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional atau internasional	Nihil	NPL Nihil
k. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	Nihil	NPL Nihil
l. Kegiatan UMKM	Rp5.827.771.620	NPL 0,00%

1.2. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

1.2.1. Visi

Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

1.2.2. Misi

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat
2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup

1.3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tertanggal 27 Juli 2017 perihal Keuangan Berkelanjutan, BPR sebagai Lembaga Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan konsep keuangan berkelanjutan secara bertahap. Hal ini mencakup pengintegrasian delapan prinsip utama ke dalam kerangka organisasi, dengan fokus pada keseimbangan antara tiga aspek fundamental: Keuntungan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, dan Kelestarian Lingkungan.
2. Dalam implementasinya, BPR diwajibkan menyusun RAKB yang merupakan dokumen komprehensif menggambarkan rencana kegiatan usaha baik jangka pendek maupun panjang. Dokumen ini mencakup strategi konkret untuk merealisasikan program kerja dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang tepat.
3. Sesuai ketentuan, BPR harus menyusun Laporan Keberlanjutan yang secara menyeluruh mengungkapkan kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan dalam konteks praktik bisnis berkelanjutan.
4. Prosedur ini mengatur secara rinci mekanisme koordinasi antarunit dalam organisasi BPR, meliputi peran strategis Direksi, Bagian Bisnis, Sumber Daya Manusia, Unit Kepatuhan, dan Manajemen Risiko.
5. Untuk mendukung transformasi digital dan implementasi keuangan berkelanjutan, BPR membutuhkan Standar Pedoman Operasional yang komprehensif dan adaptif.

1.4. Program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1.4.1. Rencana Satu Tahun

No	Periode Pelaksanaan	Uraian Aktivitas	Target dan Tujuan	Indikator Pencapaian
1	01 Jan 2026 s/d 31 Jan 2026	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan awareness (penyadartahuan) tentang Keuangan Berkelanjutan.	Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai.
2	01 Feb 2026 s/d 28 Feb 2026	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup (Reminder)	Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar.
3	01 Mar 2026 s/d 31 Mar 2026	Penurunan Penggunaan Listrik (Kwh) dan penghematan air.	Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi	Penghematan biaya listrik dan air sebesar 15% dibandingkan dengan tahun

				2025 dan perlunya pemasangan sticker- sticker tentang penghematan penggunaan listrik dan air pada beberapa sudut kantor sebagai upaya untuk meningkatkan awareness pegawai
4	01 Apr 2026 s/d 30 Apr 2026	Efisiensi Penggunaan Listrik	Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi	Penghematan biaya listrik sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2025
5	01 Mei 2026 s/d 31 Mei 2026	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ditunjuknya Unit Kerja yang mengelola dan/atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan
6	01 Jul 2026 s/d 31 Jul 2026	Mengurangi Penggunaan Kertas	Penghematan dan mendukung program go green	Penghematan penggunaan kertas sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2023.
7	01 Agt 2026 s/d 31 Agt 2026	Penyusunan SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan	Memiliki SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan	SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris
8	01 Okt 2026 s/d 31 Okt 2026	Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan	Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai.	Penurunan penggunaan air minum kemasan
9	01 Okt 2026 s/d 31 Okt 2026	Meningkatkan pertumbuhan kredit kepada usaha-usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) sebesar 1 (satu) % dari portofolio KYD UKM tahun sebelumnya.	Memberantas kemiskinan dan kelaparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.	Bertambahnya pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) yang Berwawasan Lingkungan.
10	01 Nov 2026 s/d 30 Nov 2026	Pilot Project Pembiayaan Sepeda Motor Listrik	Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan untuk mendukung program pemerintah menggeser Sepeda Motor Listrik berbahan bakar fosil ke Listrik.	Terdapat portofolio kredit minimal Rp. 50 juta untuk pembiayaan sepeda motor listrik
11	01 Des 2026 s/d 31 Des 2026	Penyesuaian dan evaluasi kebijakan & prosedur di bidang Perkreditan	Mendukung program pemerintah untuk berkomitmen dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk dibuatkannya kebijakan.	Telah dilakukannya penyesuaian kebijakan & prosedur di bidang Perkreditan

1.4.2. Rencana Lima Tahun

No	Tahun	Uraian dan Target Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1	2026	Penyempurnaan Standar Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan Memiliki Standar dan Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan yang lebih lengkap	Standar Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris
2	2026	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep Keuangan Berkelanjutan Peningkatan awareness (penyadartahuan) tentang Keuangan Berkelanjutan.	Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai.

3	2026	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup (Reminder) Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar.
4	2026	Penurunan Penggunaan Listrik (Kwh) dan penghematan air. Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi	Penghematan biaya listrik dan air sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2025 dan perlunya pemasangan sticker- sticker tentang penghematan penggunaan listrik dan air pada beberapa sudut kantor sebagai upaya untuk meningkatkan awareness pegawai
5	2026	Efisiensi Penggunaan Listrik Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi	Penghematan biaya listrik sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2025
6	2026	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ditunjuknya Unit Kerja yang mengelola dan/ atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan
7	2026	Mengurangi Penggunaan Kertas Penghematan dan mendukung program go green	Penghematan penggunaan kertas sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2025
8	2026	Penyusunan SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan Memiliki SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan	SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris
9	2026	Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai.	Penurunan penggunaan air minum kemasan
10	2026	Meningkatkan pertumbuhan kredit kepada usaha-usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) sebesar 1 (satu) % dari portofolio KYD UKM tahun sebelumnya. Memberantas kemiskinan dan kelaparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.	Bertambahnya pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) yang Berwawasan Lingkungan.
11	2026	Pilot Project Pembiayaan Sepeda Motor Listrik Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan untuk mendukung program pemerintah menggeser Sepeda Motor Listrik berbahan bakar fosil ke Listrik.	Terdapat portofolio kredit minimal Rp. 50 juta untuk pembiayaan sepeda motor listrik
12	2027	Penyesuaian dan evaluasi kebijakan & prosedur di bidang Perkreditan Mendukung program pemerintah untuk berkomitmen dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk dibuatkannya kebijakan.	Telah dilakukannya penyesuaian kebijakan & prosedur di bidang Perkreditan
13	2028	Memiliki Produk Keuangan Berkelanjutan Melakukan kajian-kajian terkait permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan	Telah dilakukan kajian terkait produk pembiayaan usaha daur ulang kertas, plastik dan lainnya
14	2029	Pembelajaran terhadap Debitur Edukasi kepada debitur kategori kegiatan usaha berkelanjutan	Edukasi kepada debitur terkait kategori kegiatan usaha berkelanjutan
15	2030	Pengembangan portofolio implementasi Keuangan Berkelanjutan Jumlah kredit/pembiayaan Keuangan Berkelanjutan tumbuh 10% dari tahun awal implementasi.	Jumlah kredit/pembiayaan Keuangan Berkelanjutan tumbuh 10% dari tahun awal implementasi.

1.5. Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan

BPR Bank Shinta Putra akan mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

1.6. Seluruh Pihak yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan

1. Unit Kerja RAKB menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap tahun termasuk bekerjasama dengan satuan kerja terkait khususnya dalam memproyeksikan rencana kegiatan yang masuk dalam kategori Keuangan Berkelanjutan.
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko memastikan penyusunan pedoman perusahaan dalam Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank, melakukan review dan memberikan rekomendasi terkait aspek Kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank. Selanjutnya melakukan monitoring Risiko Bank (Kredit dan Risiko Lainnya) terkait penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.
3. Satuan Kerja Personalia dan umum melakukan pengembangan kapasitas intern pegawai terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan.
4. Seluruh karyawan menjadi penanggungjawab pelaksanaan program keuangan berkelanjutan.

BAB II

PROSES PENYUSUNAN

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

2.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan

Rujukan yang digunakan sebagai acuan BPR Bank Shinta Putra dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut.

- a. Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 – 2019.
- b. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II di Indonesia 2021 – 2025.
- c. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik tanggal 27 Juli 2017.
- d. Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017.

2.2. Keterlibatan Pihak Penyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam mengembangkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), BPR Bank Shinta Putra memilih untuk tidak melibatkan pihak eksternal atau konsultan. Hal ini dilakukan oleh Bagian Penyusunan RKA / Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dengan dukungan dari unit-unit kerja yang terkait dengan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan. Beberapa unit kerja yang terlibat antara lain:

1. Pengembangan Produk dan Jasa keuangan berkelanjutan yang melibatkan Bagian Kredit dan Bagian Dana
2. Pengembangan Kapasitas Intern yang melibatkan Bagian Personalia dan Umum.
3. Penyesuaian organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Standar Operasional Prosedur melibatkan Bagian Personalia dan Umum, Bagian Kepatuhan, Bagian Kredit dan Bagian Dana

BAB III

FAKTOR PENENTU

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

3.1. Rencana Strategis Bank

Menyesuaikan dengan kondisi pasar pada saat ini BPR Bank Shinta Putra akan terus mengembangkan produk- produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Yogyakarta pada umumnya selain dari kredit utama BPR Bank Shinta Putra yang pasarannya adalah pegawai negeri sipil daerah dan kontraktor, maka BPR Bank Shinta Putra juga akan membantu kredit UMKM sesuai dengan arah dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk menunjang hal tersebut BPR Bank Shinta Putra akan melaksanakan pelatihan- pelatihan kepada para pegawai agar bisa menyesuaikan dengan arah kebijakan ekonomi dan dapat meminimalisir risiko yang akan tumbuh dikemudian hari.

Menyesuaikan dengan kebutuhan pasar maka Bank akan fokus pada peningkatan laba dan selalu memperhatikan RAKB sesuai dengan arahan OJK dengan cara :

1. Penyesuaian prosedur penyaluran kredit.
2. Membangun Call Centre untuk kebutuhan nasabah.

Sesuai dengan visi BPR Bank Shinta Putra untuk menjadi Bank berdaya saing tinggi dan kuat di Yogyakarta BPR Bank Shinta Putra mempunyai strategi sebagai berikut :

1. BPR Bank Shinta Putra akan melakukan ekspansi bisnis ke kabupaten- kabupaten di DIY
2. Ikut serta dalam pemberian kredit sindikasi bersama mitra Bank daerah.
3. Memberikan fasilitas layanan prioritas kepada nasabah.
4. Pembuatan promosi audio maupun video.

3.2. Kapasitas Organisasi

3.2.1. Kapasitas Organisasi

Seiring persaingan yang semakin meningkat maka dibutuhkan tenaga- tenaga yang berkompeten pada bidang masing- masing , BPR Bank Shinta Putra juga memperhatikan kesetaraan gender dalam penerimaan pegawai.

Dewan Komisaris Bank

No	Nama	Jabatan
1	Nur Cahyo, SE,MM	Komisaris Utama
2	Ari Santi Handayani,SE.MM	Komisaris

Direksi Bank

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Wulfram Margono,SP	Direktur Utama
2	Andi Asmoro H, SE.MH.	Direktur YMFK

Pejabat Eksekutif / Divisi / Unit / Satuan Kerja

No	Nama	Uraian Divisi / Unit / Satuan Kerja
1	F. Listyaning Sudinar,SE.	PE Manrisk Kep Apuppt SAF
2	Wahyu Sulisty Nugroho,SH.	PE Audit Intern
3	Lela Nurlela Sumaryani,SE	Kepala Bagian Operasional Keuangan
4	Elly Sri Widiastuti,SE.	Kepala Bagian Personalia dan Umum
5	Agung Handoko,SPd.	Kepala Bagian Kredit
6	Florentina Supriyanti,SE	Kepala Bagian Adm Kredit / Legal
7	Chatarina Manggih R. Amd	Kepala Bagian Rahdana

3.2.2. Sumber Daya Manusia

Seiring persaingan yang semakin meningkat maka dibutuhkan tenaga- tenaga yang berkompeten pada bidang masing- masing Bpr Bank Shinta Putra juga memperhatikan kesetaraan gender dalam penerimaan pegawai.

1. Jumlah Komposisi Karyawan

Jumlah Komposisi Pegawai Bank Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Doktoral (S3)	0
2	Pasca Sarjana (S2)	3
3	Sarjana (S1)	25
4	Sarjana Muda / Diploma	3
5	SMA Atau Sederajat	7
6	SMP Sederajat	0
7	SD Sederajat	0
Total		38

Jumlah Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	20
2	Perempuan	18
Total		38

3.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

3.3.1. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan Bank sesuai pada tabel di bawah ini: faktor- faktor yang mendukung penetapan tujuan dan prioritas Keuangan Berkelanjutan. Faktor- faktor yang disebutkan adalah faktor- faktor internal dan eksternal yang telah dimiliki ataupun sedang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal BPR bersangkutan. BPR menjelaskan keterkaitan

faktor-faktor tersebut dengan upaya BPR dalam merencanakan dan menjalankan program Keuangan Berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa:

1. Rencana strategis bisnis yang telah ada;
2. Kapasitas organisasi yang dimiliki sekarang;
3. Kondisi keuangan dan kapasitas teknis yang dimiliki sekarang;
4. Kerjasama dengan pihak eksternal jika ada;
5. Strategi komunikasi yang ada;
6. Sistem monitoring, evaluasi dan mitigasi yang selama ini dijalankan; dan
7. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu Keuangan Berkelanjutan.

A. Kinerja Keuangan

(Dalam Juta Rupiah)

No	Indikator	2025 (TW III)	2024	2023
1	Total Aset	Rp77.886.744.701	Rp71.257.838.294	Rp67.691.458.298
2	Modal Inti	Rp6.920.094.336	Rp7.478.114.119	Rp7.393.934.424
3	Kredit Yang Diberikan	Rp61.212.635.545	Rp58.451.102.549	Rp57.251.947.794
4	Dana Pihak Ketiga	Rp53.084.124.258	Rp46.931.104.715	Rp44.966.033.086
5	Pendapatan Operasional	Rp9.270.468.014	Rp10.226.503.769	Rp9.430.327.183
6	Beban Operasional	Rp8.582.818.492	Rp9.593.948.455	Rp8.553.307.079
7	Laba Operasional	Rp685.555.928	Rp580.755.314	Rp969.171.100

B. Rasio Keuangan

No	Rasio	2025 (TW III)	2024	2023
1	Rasio KPMM	25,15%	31,32%	25,80%
2	NPL Gross	15,01%	12,20%	14,72%
3	NPL Net	13,92%	11,17%	14.110,00%
4	ROA	1,08%	0,90%	1,44%
5	NIM	8,90%	9,05%	9,53%
6	Rasio BOPO	92,58%	93,80%	90,70%
7	LDR	114,39%	124,55%	127,32%

3.3.2. Kapasitas Teknis

Peningkatan kapasitas teknis teknologi Bank menjadi perhatian utama antara lain dengan penyediaan aplikasi / software berbasis teknologi digital dan infrastruktur teknologi untuk mendukung aktivitas operasional dan pengembangan bisnis di masa mendatang.

3.4 Strategi Komunikasi

BPR Bank Shinta Putra berupaya menciptakan komunikasi yang baik untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan kinerja individu pegawai dan perusahaan secara berkelanjutan. Dalam konteks Keuangan Berkelanjutan, BPR Bank Shinta Putra terus mengkomunikasikan agar aktivitas operasional untuk lebih mendukung pelestarian lingkungan melalui berbagai inisiatif di antaranya :

1. Melakukan penghematan energi, air, dan kertas
2. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pegawai tentang perilaku hidup ramah

lingkungan.

3.5 Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi

Monitoring dilakukan secara periodik untuk memastikan rencana dilaksanakan dan evaluasi terus berjalan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mekanisme monitoring yang dilakukan antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam rangka monitoring kondisi terkini.
2. Rapat yang dilakukan secara berkala untuk memonitor kinerja seluruh unit kerja.

3.6 Kebijakan Pemerintah

Pelaksanaan RAKB mengacu kepada regulasi dan kebijakan pemerintah.

BAB IV
PRIORITAS DAN URAIAN
RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

4.1. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan/ atau Standar Prosedur Operasional yang mendukung Keuangan Berkelanjutan.

a. Dasar Pemikiran

Pengembangan dan penguatan organisasi perusahaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Keuangan berkelanjutan beserta penerapan dan implementasinya dikarenakan organisasi menjadi landasan utama dalam membangun keuangan berkelanjutan. Pelaksanaan keuangan berkelanjutan dimulai dari setiap tatanan organisasi. Komitmen serta dukungan dari Manajemen merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penentu dari terlaksananya program- program yang telah direncanakan. Dukungan dari setiap organisasi yang bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya agar selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memberikan pertimbangan kepada Direksi di dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/ atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan pembenahan prosedur operasional.

b. Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Periode	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup (Reminder)	01 Feb 2026 s/d 28 Feb 2026	SDM	Kepatuhan
2	Penurunan Penggunaan Listrik (Kwh) dan penghematan air.	01 Mar 2026 s/d 31 Mar 2026	SDM	Bagian Umum
3	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	01 Mei 2026 s/d 31 Mei 2026	SDM	Direksi
4	Mengurangi Penggunaan Kertas	01 Jul 2026 s/d 31 Jul 2026	SDM	Bagian Umum dan Kepatuhan
5	Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan	01 Okt 2026 s/d 31 Okt 2026	SDM	Bagian Kepatuhan
6	Meningkatkan pertumbuhan kredit kepada usaha-usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) sebesar 1 (satu) % dari portofolio KYD UKM tahun sebelumnya.	01 Okt 2026 s/d 31 Okt 2026	SDM	Bagian Bisnis
7	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep Keuangan Berkelanjutan	01 Jan 2026 s/d 31 Jan 2026	Dana dan sumber daya manusia	Bagian SDM dan Kepatuhan
8	Efisiensi Penggunaan Listrik	01 Apr 2026 s/d 30 Apr 2026	SDM	Bagian Umum
9	Penyusunan SPO	01 Agt 2026 s/d 31	SDM	Bagian Kepatuhan

	Implementasi Keuangan Berkelanjutan	Agt 2026		
10	Pilot Project Pembiayaan Sepeda Motor Listrik	01 Nov 2026 s/d 30 Nov 2026	SDM	Bagian Bisnis

c. Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan di atas membutuhkan dana yang berasal dari dana perusahaan. Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Divisi Penanggung Jawab kegiatan dengan melibatkan setiap unsur dalam struktur organisasinya serta membutuhkan masukan dari regulator, Auditor Eksternal maupun lembaga konsultan/ praktisi dalam implementasinya

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Proses penilaian akan dilaksanakan dengan merujuk pada parameter dan jadwal yang telah ditetapkan secara komprehensif oleh unit organisasi yang bertanggung jawab.

e. Tantangan dan Rencana Kedepan

Tantangan eksternal antara lain adanya perubahan kebijakan pemerintah, kondisi permintaan agregat masyarakat atas program keuangan berkelanjutan dan lain sebagainya.

BAB V
TINDAK LANJUT
RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN**5.1. Pegawai, Pejabat dan/atau Unit Kerja yang Bertanggung Jawab terhadap Monitoring dan Evaluasi**

1. Pemantauan merupakan aktivitas penting untuk memastikan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan dilaksanakan secara efektif.
2. Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dilakukan di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan dievaluasi pada akhir setiap periode kegiatan.
3. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas dan pencapaian program, serta mengidentifikasi tindakan yang diperlukan jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Peran Direktur Kepatuhan dan kepala divisi terkait dalam hal ini sangat penting.
4. Fungsi Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, sedangkan Manajemen Risiko melakukan pemantauan risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kerangka penerapan manajemen risiko.
5. Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dilakukan di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan dievaluasi pada akhir setiap periode kegiatan.
6. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas dan pencapaian program, serta mengidentifikasi tindakan yang diperlukan jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
7. Direktur Kepatuhan dan Kepala Divisi terkait memantau pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan dari sisi kepatuhan dan aspek hukum, sedangkan Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kerangka penerapan manajemen risiko.

5.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Untuk memastikan efektivitas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diperlukan penentuan jangka waktu secara berkala dengan mempertimbangkan koordinasi antara para pihak, standar yang dibuat dalam pelaksanaannya, serta pemahaman yang sama dalam pelaksanaan, maka waktu pengukuran dan penyampaian realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan antara lain

1. Pemantauan Realisasi Rencana Aksi Keuangan berkelanjutan tahun berjalan
2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Penentuan Waktu Untuk Mengukur
Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

No	Aktivitas	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Pemantauan Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun berjalan	Bulan Desember	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/ RAK dan RAKB bekerjasama dengan divisi terkait
2	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Akhir November Tahun Berjalan	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/ RKA dan RAKB
3	Laporan Keberlanjutan	Paling lambat akhir April Tahun berjalan	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/ RKA dan RAKB bekerjasama dengan divisi terkait

5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat terimplementasi sesuai harapan dan timeline yang direncanakan, maka bank akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Terus berusaha memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh BPR
 2. Terus mensosialisasikan aksi keuangan berkelanjutan sebagai komitmen BPR menjalankan instruksi dari pemerintah
1. Pelaksanaan dan sosialisasi aksi keuangan berkelanjutan pada tahun berjalan.
 2. Mengkaji ulang indikator kinerja yang dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya.
 3. Melakukan revisi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelemahan pada penyusunan sebelumnya.

5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Mencapai Tujuan yang Diinginkan

Untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan keuangan berkelanjutan, BPR Bank Shinta Putra melakukan pemetaan risiko terlebih dahulu atas setiap rencana prioritas sehingga dapat menghasilkan mitigasi risiko.

- a. Dalam hal memitigasi risiko atas penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar Prosedur Operasional yang mendukung keuangan berkelanjutan maka diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keuangan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan saat ini dan generasi yang akan datang, sehingga usaha perbankan yang dijalankan bisa tetap bertahan dan semakin berkembang di masa-masa yang akan datang.
- b. Pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola Keuangan Berkelanjutan.
 1. Meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk dan/ atau jasa dimaksud. Program ini antara lain untuk pegawai yang bekerja di unit manajemen risiko, pengembangan bisnis dan pelayanan konsumen.
 2. Mulai merancang dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas intern sebelum waktu mulai implementasi. Prioritas ditujukan bagi pengurus bank dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan. Untuk selanjutnya, target jangka panjang program peningkatan kapasitas intern ditujukan untuk seluruh pegawai karena keberhasilan implementasi Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh pegawai.
 3. Menyiapkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan program- program Keuangan Berkelanjutan. Penyiapan sumberdaya manusia dapat berupa penyesuaian kriteria dalam proses rekrutmen pegawai baru, pelatihan, proses pengayaan, penyesuaian penilaian kinerja dan sistem remunerasi.
- c. Pengembangan dan penyesuaian Produk dana dan Jasa serta layanan perbankan yang mendukung keuangan berkelanjutan.

1. Mencermati dan mempertahankan pasar yang diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan & pemberdayaan sektor binaan UMKM, pariwisata, dan potensi lainnya. Mencermati situasi ini, maka BPR Bank Shinta Putra akan melakukan inovasi layanan untuk memudahkan kebutuhan nasabah salah satunya adalah layanan mobil Kas Keliling yang didesain khusus untuk memenuhi transaksi perbankan nasabah di manapun dan kapanpun.
 2. Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan. Informasi ini memastikan bahwa bank hanya menjual produk dan jasa yang sudah teruji keamanannya melalui penyampaian risiko dan pemilihan mitra bisnis.
 3. BPR Bank Shinta Putra memberikan perlindungan dan keamanan produk bagi nasabah dengan memberikan keamanan dan nyaman dalam setiap fitur layanan kepada nasabah. Fitur layanan akan selalu dikembangkan dengan dukungan sistem teknologi informasi dalam area ketersediaan layanan sistem (system availability), keandalan sistem (system reliability) dan sistem keamanan (cyber security). Penerapan sistem deteksi penipuan (fraud detection system) juga diawasi secara ketat. Diupayakan seluruh produk telah diuji keamanannya, untuk memastikan risiko kerugian yang seminimal mungkin atas produk tersebut, BPR Bank Shinta Putra akan selalu memberikan informasi atas semua risiko yang dapat terjadi kepada nasabah sebagai bahan pertimbangan menggunakan produk yang ditawarkan lebih lanjut.
 4. Mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan melalui metode survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, dimana survei merupakan salah satu sarana bagi BPR Bank Shinta Putra dalam melakukan komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Hasil survei dan mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negative akan disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan transparansi dan keseimbangan penyampaian informasi, yang tidak hanya pada dampak positif saja.
 5. BPR Bank Shinta Putra akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan nasabah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja bank. Selain nasabah, masukan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, masyarakat sekitar, Regulator juga perlu diperhatikan oleh bank.
- d. Penyaluran kredit berbasis lingkungan.
1. Mempertahankan dan meningkatkan portofolio pembiayaan yang berdampak positif bagi aspek lingkungan dan sosial.
 2. Meningkatkan kapasitas perbankan dalam memahami risiko lingkungan serta dampak positif dari kredit yang disalurkan.
 3. Memperkuat kolaborasi dan koordinasi bank dengan sektor industri hijau.
 4. Menentukan batas penyaluran kredit minimal yang berlaku bagi internal bank mengingat meski aturan sudah dibuat, tetapi kewajiban terkait dengan jumlah penyaluran kredit minimal yang harus disalurkan belum ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi beban ekosistem terhadap usaha yang dibiayai bank masih tinggi dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan kelestarian lingkungan kurang kuat.
 5. Memberikan insentif kepada debitur yang berada pada kolektibilitas rendah namun secara efektif telah menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam proses bisnisnya dengan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial atau memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak

perubahan iklim.

- e. Penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung aspek keberlanjutan dalam aktifitas operasional Bank. Mitigasi risiko diatas dapat dilakukan dengan mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan polusi/limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon, serta memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang, perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.
- f. Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang searah dengan program keuangan berkelanjutan.
 - 1. Menempatkan risiko yang ditimbulkan dari aktifitas CSR dibawah monitoring dan evaluasi seorang Direksi demi menekankan perlunya komitmen berkelanjutan dalam melaksanakan aktifitas CSR.
 - 2. Mitigasi risiko di bidang CSR dilakukan dengan merancang kegiatan CSR yang dikaitkan dengan risiko yang ditimbulkan kemudian akan dilakukan analisa risiko dengan melibatkan divisi-divisi yang berpotensi terkena risiko.
 - 3. Menerapkan prinsip bahwa kegiatan CSR yang tepat tanggung-jawab seluruh divisi dan merupakan kegiatan di awal kegiatan bisnis, bukan kegiatan di akhir tahun setelah perusahaan memperoleh profit, sehingga kegiatan CSR yang akan dilaksanakan didasarkan atas perencanaan yang tepat disertai dengan strategi pencapaian yang efektif.

5.5. Penutup

Demikian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT. BPR Bank Shinta Putra ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan implementasi Keuangan Berkelanjutan.

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN RAKB (RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN)

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan RAKB Tahun 2026
PT. BPR BANK SHINTA PUTRA**

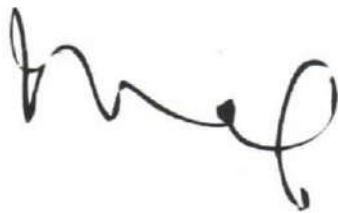
Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tahun 2018

Demikian Laporan RAKB Tahun 2026 ini disusun sebagai wujud komitmen Bank dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan kinerja perbankan yang baik yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan 3P yaitu Profit (Ekonomi), People (Sosial) dan Planet (Lingkungan).

Kulon Progo, 05 Desember 2025

PT. BPR BANK SHINTA PUTRA



Ir. Wulfram Margono, SP
Direktur Utama

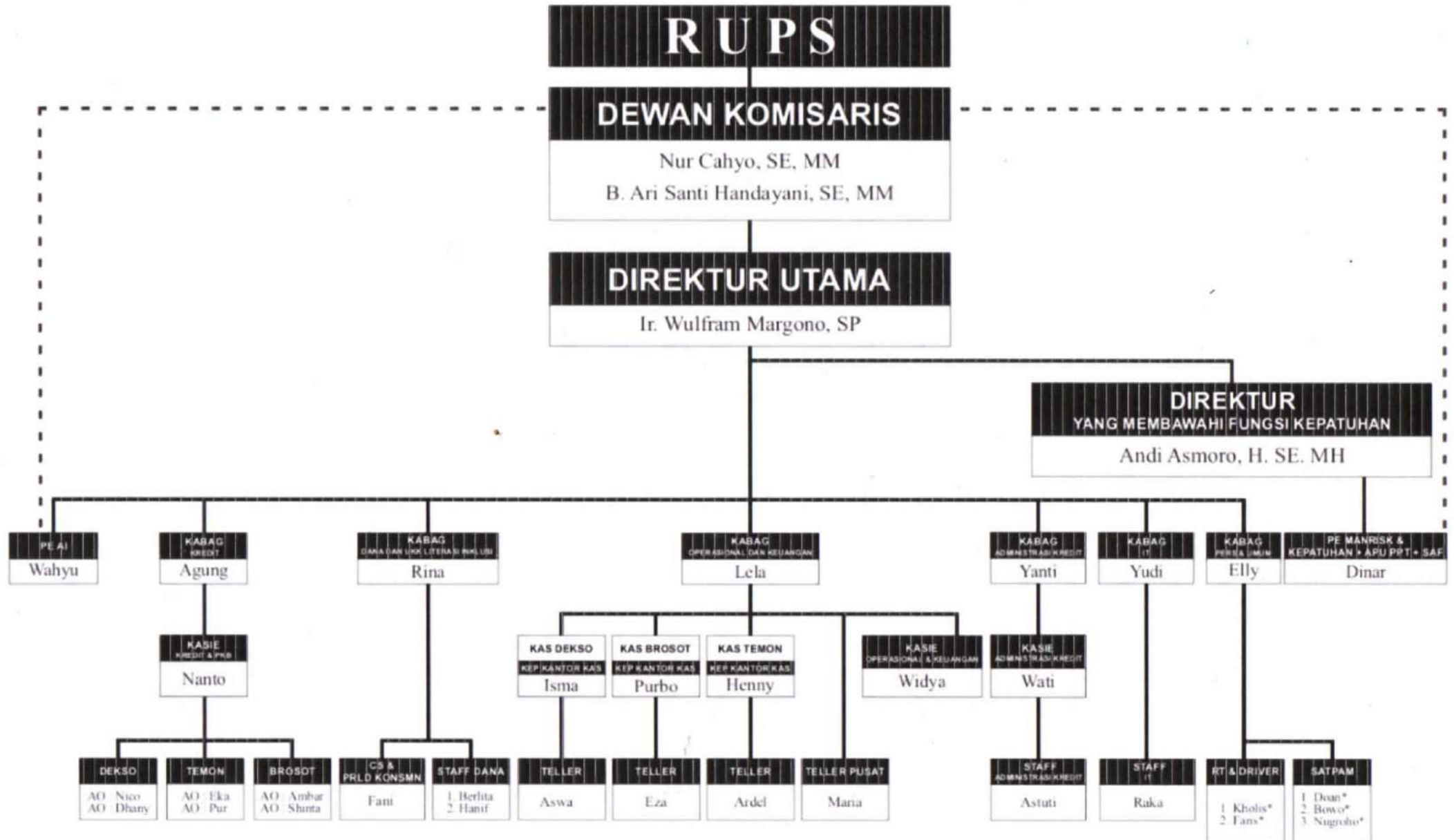


BANK SHINTA PUTRA
PT. Bank Perekonomian Rakyat



Nur Cahyo, SE.MM
Komisaris Utama

STRUKTUR ORGANISASI



Nomor : 095/ B/BSP/12/2025
Tanggal : 05 Desember 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada

Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Regional Yogyakarta

Jln Jendral Sudirman No 22 Gowongan Jetis Kota Yogyakarta

DIY 55232

Referensi:

1. POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tahun 2018

Perihal : **Penyampaian Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT. BPR BANK SHINTA PUTRA Tahun 2026**

Mengacu pada referensi tersebut di atas Lembaga Jasa Keuangan dalam hal ini BPR dan BPRS wajib menyusun dan menyampaikan Laporan RAKB ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tahunnya pada waktu yang sama dengan penyampaian RBB (Rencana Bisnis Bank) yaitu paling lambat tanggal 15 Desember. Oleh karenanya menunjuk perihal dimaksud, kami menyampaikan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT. BPR BANK SHINTA PUTRA Tahun 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kulon Progo, 05 Desember 2025

PT. BPR BANK SHINTA PUTRA



BANK SHINTA PUTRA
Bank Perkreditan Rakyat

Andi Asmoro, H.SE.,MH

Direktur YMFK